

DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
DESA LANGDUNGSARI KOTA MALANG

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MERSIANA HILDA

Nim:2018120076

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG

2022

DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LANGDUNGSARI KOTA MALANG

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan guna memahami dan mengetahui seperti apa dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di Desa Landungsari Kota Malang atas kebijakan pemerintah dalam pendistribusian bantuan langsung tunai. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di desa Landungsari Kota Malang menjadi pokok permasalahan yang dipetakan pada penelitian ini. Masalah tersebut dipandang berdasarkan pandangan sosiologi komunikatif dan penelitian kualitatif menjadi pendekatan pada penelitian ini.

Di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh warga terkategori miskin di berbagai daerah di Indonesia, bantuan langsung tunai (BLT) menjadi sebuah kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah Indonesia guna membantu untuk meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Kebijakan bantuan langsung tunai merupakan kebijakan bantuan yang didistribusikan kepada masyarakat terkategori miskin berupa uang tunai yang akan menjadi jaminan sosial terhadap masyarakat yang terkategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Kebijakan ini mendistribusikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat terkategori miskin berdasarkan atas situasi miskin yang dialami tanpa mempertimbangkan kontribusi masyarakat tersebut seperti, premi asuransi ataupun pembayaran pajak.

Berdasarkan pendistribusian bantuan langsung tunai yang telah dilaksanakan, bantuan tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, walaupun kebijakan bantuan langsung tunai ini tidak secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat, secara garis besar dapat disimpulkan manfaat yang diberikan memang dirasa sebagai manfaat yang berjangka pendek ,diantaranya bantuan langsung tunai biasa dipergunakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sembako, hal tersebut dapat diakibatkan karena tingginya pengeluaran yang ditanggung oleh masyarakat miskin akibat inflasi yang terjadi seperti tingginya harga minyak pada pasaran.

Kata Kunci: Dampak BLT, Kesejahteraan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gunawan, (2017) dalam rangka membantu masyarakat terkategori miskin di Indonesia, pemerintah memprakarsai kebijakan bantuan langsung tunai yang menjadi reaksi pemerintah terhadap kenaikan harga minyak dunia yang ada. Dengan fenomena meningkatnya harga minyak mentah dunia yang menukik hingga sebesar 120 USD per barelnya, pemerintah Indonesia memberikan kebijakan untuk menarik subsidi harga pada harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, yang mana hal tersebut menyebabkan peningkatan harga pada BBM.

Anggaran pendapatan dan belanja negara berpotensi mengalami hambatan dan tidak berkelanjutan apabila pemerintah tidak mengambil kebijakan guna menyikapi naiknya harga minyak mentah dunia, sehingga pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak dalam negeri. Di sisi lain, hal tersebut menimbulkan buruknya pada kepercayaan pasar yang selanjutnya juga berdampak pada penurunan ekonomi nasional.

Akibat eskalasi harga bakar minyak dalam negara hendak dirasakan oleh seluruh susunan warga, pemerintah berniat menjaga ketenteraman warga yang berpendapatan kecil paling utama warga miskin lewat program ganti rugi berbentuk program pembagian Bantuan Langsung Tunai.

Bantuan langsung tunai yang ditujukan kepada masyarakat miskin di berbagai daerah dirasakan sangat bermanfaat dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun bantuan langsung tunai tidak secara langsung memberikan dampak pada peningkatan daya beli masyarakat terkategori miskin, paling utama dalam pelampiasan keinginan bantuan langsung tunai diberi pada warga miskin sanggup penuhi keinginan hidupnya. Warga miskin amat menginginkan bantuan dari pemerintah guna mendukung keinginan hidupnya yang terus

menjadi susah. warga miskin di makassar yang mengatas namakan Sindikat Orang Indonesia berunjuk rasa di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, ini dicoba pada bertepatan pada 29 April 2010. Para pengunjuk rasa memindai pusat statistik senantiasa membukukan mereka selaku masyarakat miskin, supaya masyarakat miskin kota senantiasa bisa menyambut bantuan langsung tunai guna memudahkan kesusahan ekonomi. Bantuan langsung tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat guna membagikan pada warga miskin selaku respon atas melonjaknya harga material bakar minyak supaya bisa menolong warga miskin pergi dari darurat ekonomi bantuan langsung tunai berkarakter waktu pendek, maksudnya program ini cuma dikeluarkan pada kondisi khusus serta karakternya sementara.

Distribusi anggaran pada rumah tangga miskin dicoba oleh PT Pos indonesia lewat kantor cabangnya di semua indonesia. Dalam penerapan program ini tidak ditemui terdapatnya referensi ataupun prinsip biasa yang bermuatan uraian menyeluruh mengenai program untuk seluruh pihak yang bersangkutan Referensi yang ada cuma berbentuk novel petunjuk parsial semacam petunjuk pendataan Rumah Tangga Miskin serta petunjuk pembagian kartu ganti rugi BBM(KKB) yang persebarannya, cenderung terbatas digolongkan dalam BPS(Tubuh Pusat Statistik). Akhirnya, ada perbandingan uraian dampingi pihak terpaut mengenai penerapan program lembaga yang berfungsi dalam penerapan program BLT merupakan Unit Social BPS, serta PT Pos indonesia. Pemerintah wilayah(Pemda) pada awal mulanya tidak dilibatkan dengan cara sungguh- sungguh. Tetapi, dengan kemajuan penerapan program pihak pemda serta semua jajaranya kerap dimohon membantu cara pencarian anggaran dalam bagan meredam luapan social.

Program bantuan langsung tunai(BLT) diselenggarakan Oktober 2005 dalam bagan kebijaksanaan proteksi social(social protection) selaku akibat penurunan bantuan materi bakar minyak(BBM). Metode yang dicoba ialah asistensi sosial (social assistance) yang diarahkan

guna menolong warga miskin supaya senantiasa bisaenuhi keinginan dasarnya, menghindari penyusutan derajat keselamatan warga miskin dampak kesusahan ekonomi, serta menaikkan tanggung jawab sosial bersama. kebijaksanaan ini pula disinergikan dengan kebijaksanaan pemberdayaan warga lewat Program Nasional Pemberdayaan Warga(PNPM) serta angsuran harus kecil serta menengah(KUKM), alhasil desain perlindungan sosial untuk warga miskin senantiasa mendesak keberdayaan warga cocok dengan kemampuan yang dipunyai. lewat BLT diformulasikan balik metode usaha penyelesaian kekurangan yang mengaitkan faktor warga, mulai dari langkah pemrograman, penerapan. sampai kontrol serta penilaian.

Memandang pada akibat yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan BLT ini, kebijaksanaan BLT tidak hendak membagikan akibat yang penting kepada situasi warga miskin di indonesia. Ini diakibatkan nominal BLT yang diserahkan tidak balance dengan eskalasi bayaran hidup yang dikira oleh warga dampak kenaikan harga BBM. Eskalasi BBM itu hendak mendesak eskalasi bayaran input penciptaan warga miskin yang mayoritas ada pada zona pertanian(bagus orang tani ataupun nelayan) yang ada di pedesaan. Bila menyamakan keseluruhan eskalasi bayaran hidup(bayaran pelampiasan keinginan bawah serta input penciptaan) warga miskin dengan nominal anggaran BLT yang diserahkan, kebijaksanaan ini hendak berakibat penting. Bila, pemerintah tidak dapat menjamin berdaya guna serta efektifitas penggunaan anggaran BLT yang diserahkan pada warga.

Menurut Hidayat(2019), Akibat yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan BLT itu tidak sanggup memberikan akibat positif pada kenaikan produktivitas warga miskin, melainkan kecenderungan membagikan akibat minus pada penyusutan produktifitas.“ Masyarakat Miskin Menggugat Penjataan BLT”. para pengunjuk rasa memidai pusat statistik senantiasa membukukan mereka selaku masyarakat miskin kota senantiasa bisa menyambut bantuan langsung tunai guna

memudahkan kesusahan ekonominya. Penerimaannya merupakan warga yang tingkatan keselamatan kecil, Program pemerintah guna kurangi kekurangan ataupun memajukan keselamatan biasa dengan membagikan Bantuan Langsung Tunai(BLT) mulai terlaksananya lewat Instruksi Kepala negara No 12 tahun 2005, mengenai“ Penerapan Bantuan Langsung Tunai pada rumah tangga miskin”. Penerapan Bantuan Langsung Tunai guna rumah tangga target, Tujuan yang diharapkan lewat kebijaksanaan program ini merupakan bisa menanggapi perkara kekurangan di Indonesia. Selaku dampak dari seberinda pergantian yang sudah terjalin, bagus dengan cara nasional ataupun garis besar. Selaku sesuatu program serta kebijaksanaan nasional, program BLT memiliki kerangka balik penerapan yang analitis, bagus dengan cara deskriptif analisa kondisional ataupun deskriptif operasional perundang- undangan. Sehabis pemerintah menyudahi guna menaikkan BBM, kebijaksanaan Bantuan Langsung Tunai(BLT) jadi kebijaksanaan generasi dari kebijaksanaan eskalasi BBM itu. Kebijaksanaan BLT yang dikeluarkan pemerintah ini, memanen banyak keluhan dari warga, pemerintah wilayah, mahasiswa, serta tokoh- tokoh warga bagus nasional ataupun wilayah. Kondisi ini mendesak pemerintah guna melaksanakan pendekatan subsidi secara langsung guna bekerja dalam BLT. Hendak namun, kebijaksanaan bantuan langsung tunai(BLT) pada rumah tangga miskin selalu kompensasi penurunan bantuan BBM sudah memunculkan polemik serta permasalahan terkini. Bila ditinjau dari bagian durasi keluarnya parasut hukum sampai penerapan yang cuma dalam durasi singkat, amat terasa kebijaksanaan BLT tergesa- gesa serta dipaksakan, tidak membingungkan bila kemudian mencuat banyak permasalahan antara lain belum terdapatnya kecocokan uraian antara bermacam lembaga pemerintah, alat, ataupun warga. perihal ini nampak pemakaian sebutan yang berbeda- beda. terdapat yang mengatakan Program Ganti rugi Penurunan Bantuan(PKPS), anggaran ganti rugi BBM(DKM), ataupun bantuan langsung tunai(

BLT) Fakta lemahnya pemasyarakatan pemerintah mengenai program ini. Dalam penerapan kebijaksanaan tidak senantiasa sangat mudah. tentu hendak terdapat yang jadi aspek penghambatnya, sedemikian itu pula dengan Aplikasi Bantuan Langsung Tunai(BLT) di Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Dau Kabupaten Apes, selaku masyarakat ataupun warga miskin tidak menyambut bantuan sebaliknya kenyataan dilapangan yang aku temui warga yang sanggup ataupun dengan tutur lain Kepala keluarganya mempunyai pemasukan senantiasa tiap bulan menyambut bantuan itu. Kasus hal pendataan memanglah jadi titik lemas penting. mayoritas masyarakat tidak mengenali dengan cara tentu patokan rumah tangga miskin yang berkuasa menyambut BLT tidak hanya itu, beberapa masyarakat bertugas diluar wilayah alamat begitu juga tercetak dalam dokumen kependudukan, alhasil tidak tertera ataupun terdata dengan cara dobel di tempat alamat serta di tempat wilayah bertugas. Dampak lemahnya pendataan, selaku masyarakat yang benar- benar miskin malah tidak terdata. alhasil guna menanggulangi perihal ini guna pemakaian tata cara BLT menuntut informasi yang cermat serta terpercaya, padahal guna indonesia kemajuan sistem data sedang dikira kurang.

Bagi Prihatminingtyas Budi,(2016)“ Akibat BLT kepada keselamatan orang terlibat pada prioritas warga miskin dimana prioritas pemakaian duit BLT sangat penting merupakan sembako. Perihal ini menunjukkan kalau BLT belum berdaya guna dalam penuhi keinginan warga miskin sebab prioritas penting BLT itu sedang guna keinginan bawah. Tetapi BLT itu mempunyai guna yang amat besar untuk kesinambungan hidup warga miskin paling utama dalam pelampiasan keinginan. Tidak hanya itu BLT tidak terbawa- bawa kepada kemampuan warga miskin sebab warga miskin tidak dapat hidup bila cuma menggantungkan penerimaanya pada BLT. Di satu bagian, kebijaksanaan BLT ini bisa jadi hendak membagikan akibat positif untuk warga miskin. Dengan BLT eskalasi bayaran hidup yang disebabkan oleh eskalasi BBM,

hendak sedikit tertutupi dengan terdapatnya anggaran” Bebas” yang diserahkan oleh pemerintah. Hendak namun disisi lain kebijaksanaan BLT ini mempunyai akibat yang minus pula ialah kebijaksanaan hendak berakibat minus pada sikap serta kepribadian warga. terdapatnya kebijaksanaan membuat warga jadi aleman tidak hanya itu, kasus serta efektifitas serta kemampuan kebijaksanaan ini amat diragukan. Pemberian bantuan kepada warga miskin ialah perihal yang wajib dicoba pemerintah guna penentasan permasalahan kekurangan supaya keselamatan masyarakat bertambah tetapi realitas yang terjalin di warga bantuan langsung tunai bukan jadi balasan kasus kekurangan di indonesia. sebab akibat yang ditimbulkan bukan cuma bagian positifnya saja melainkan banyak pula bawa akibat yang minus alhasil kenaikan keselamatan warga lewat bantuan langsung tunai itu dikira belum maksimum dalam menolong perekonomian warga. Pengentasan permasalahan kekurangan bukan cuma kewajiban pemerintah saja melainkan warga pula memiliki kedudukan berarti dalam perihal ini. warga itu sendiri pula seharusnya sanggup mengatur ataupun menggunakan bantuan yang diserahkan oleh pemerintah supaya bisa menaikkan keselamatan warga.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka perlu penyajian yang mendalam dan penelitian yang lebih mendalam dapat mengetahui data BLT di desa Landungsari Kota Malang maka dengan ini peneliti mengambil judul “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Landungsari Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- ❖ Bagaimana dampak bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di desa landungsari Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di desa landungsari Kota Malang.
2. Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Penulis

Peneliti ini untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pengalaman yang baik mengenai bantuan langsung tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Masyarakat

Peneliti ini dapat memberikan gambaran, tujuan, dan manfaat dari dampak bantuan langsung tunai yang telah diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo Dasar-Dasar Kebijakan Publik.2:Bandung:Alfabeta,2008.
- Antara News.” Nurhidayat: Program BLT Membantu Masyarakat Miskin Newsonline17januari2010 berita/1263736968/purgayablt membantu masyarakat miskin (7 desember 2010).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENNAS).”Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Sasaran. website resmi BAPPENAS.<http://old.bappenas.go.id/modules.php?op=modloads&name=News&file=article&sid=169> (6 Desember 2010).
- Basuki, Orin. “Pekerja Indonesia Kebanyakan Lulusan SD”. Kompas. *lulusan.SD-5* (6 Desember 2010).
- Black,james A.dan Champion,Dean J.,metode dan masalah penelitian sosial,Cet,I,Bandung:PT.Eresco,1992
- Bungin,Burhan.penelitian kualitatif,Edisi 1,Cet.2, Jakarta:Kencana,2007 ed.,Metode Penelitiann Kualitatif.Jakarta:Raja Grfindo Persada, 2008.
- Departemen Agama RL.Al-Quran dan terjemahnya. Semarang: Toha Putra,
- Elinpike,”Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Landungsari studi kasus: Kota Bandung,”Blog Elinpike, 4 januari 2010. dampak-bantuan-langsung-tunai-blt-terhadap-kesejahteraan-masyarakat-studi-kasus-kota-bandung/(diakses 6 Desember 2010).
- Gunawan,C.I and Asmari,P.2017.*Toward Nation Economic Rescue and Cakti Economic Research*,7(1),10-21.
- Gunawan,C.I (2017) “Bantuan Langsung Tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan kepada masyarakat miskin”.*
- Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang.Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan,10(2),64.74.[https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v10i2.1054](https://doi.org/10.52166/madani.v10i2.1054).
- Pengamatan Penghentian BLT Kontrak Antara Newsonline,13 Maret 2010.[http://www.antaranews.com/berita/126845630/Penggentian BLT Kontradiktif](http://www.antaranews.com/berita/126845630/Penggentian%20BLT%20Kontradiktif) (Diakses Desember 2010).
- Hidayat, I.,(2019), Kebijakan BLT tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi masyarakat miskin di Indonesia.

- Prihatmingtyas,B., (2016). “Warga miskin menuntut pembagian BLT para pengunjuk rasa memidai pusat statistik tetap mendata mereka sebagai warga miskin kota tetap dapat menerima bantuan langsung tunai untuk meringankan ekonomi.
- Prihatmingtyas,B.,(2016). Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Belimbing Berbasis Partisipatif dalam Perlindungan Sosial.Jurnal Care .4(3),November 2016.
- Qodriyatus,Siti,Solikhah.,& Yulita-Yulita. (2021). Modal Pengamatan Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Era Covid-19,10 (4) 9.<http://doi.org>.<https://doi.org> 10.30871/jaemb.V9i2.363.
- Suharto,Edi Analisis Kebijakan Pubdiksi Revisi,Bandung:Alfabeta,2008.Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Bandung: Refika Aditama,2009 “Kebijakan dan Perlindungan Sosial di Indonesia dan Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan Bandung Alfabeta:2009.
- Suharto,Bagong dan Sutimah Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Jakarta :Kencana,2007
- Taruna,Iwan dan Al Times Syamsul. “Warga Miskin Tuntut Pembagian BLT”.Liputan6.com,9 April2010.<http://liputan6.com/daerah/201004/274825/Wrga.Miskin.Tuntut.Pembagian.BLT> (5 Desember 2010).
- Tya,Analisis Kebijakan BLT,” Blog Tya.<http://Tya03.Wordpress.Com/2009/11/16/KebijakanBLT/> (Selasa 13 September 2011).
- Usman,Husaini dan Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosialisasi 2,Cet.2:Jakarta:BumiAksara.2009
- Wibawa,Budhi,Santoso T.Raharja,dan Meilany Budi Dasar-dasar Pekerjaan Sosial Bandung:Widi Pedjajaran,2010.